



Kementerian PPN/
Bappenas

Kebijakan Ekonomi Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Disampaikan pada *Diskusi Bulanan The Indonesian Forum (TIF):
Kondisi Kebebasan Ekonomi di Indonesia dan Dampaknya Bagi Lingkungan*

Anggi Pertiwi Putri

Direktorat Lingkungan Hidup
Kedeputusan Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Kementerian PPN/Bappenas



27 November 2025

Ekonomi Hijau sebagai Prioritas Perencanaan Pembangunan Nasional

UNDANG-UNDANG NO. 59 TAHUN 2024 TENTANG RPJPN 2025-2045



Visi Indonesia 2045

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan

17

Goals

8

Agenda
Pembangunan

45

Indikator

Tahapan Transformasi Indonesia dan Landasan Transformasi:



Tahap 1
(2025-2029)
Perkuatan Pondasi
Transformasi



Tahap 2
(2030-2034)
Akselerasi
Transformasi



Tahap 3
(2035-2039)
Ekspansi
Global



Tahap 4
(2040-2045)
Perwujudan
Indonesia
Emas

1.

Transformasi
Sosial

2.

Transformasi
Ekonomi

3.

Transformasi
Tata Kelola

20

Upaya Super
Prioritas
(Gamechangers)

4.

Supremasi Hukum,
Stabilitas, dan
Kepemimpinan Indonesia

5.

Ketahanan Sosial
Budaya dan Ekologi

Indonesia Emas (IE) 5 : Penerapan Ekonomi
Hijau

PERATURAN PRESIDEN NO 12 TAHUN 2025 TENTANG RPJMN 2025-2045

Asta Cita 2

Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional serta mendorong kemandirian nasional melalui swasembada dalam bidang pangan, energi, air, ekonomi Islam, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.



Prioritas Ekonomi Hijau

- Pembangunan rendah karbon
- Ekosistem ekonomi sirkular
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir
- *Green jobs*
- Pengelolaan hutan lestari



Prioritas Kualitas Lingkungan Hidup

- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang



Prioritas Keanekaragaman Hayati

- Pengelolaan kehati ekosistem, spesies, dan genetik

Asta Cita 8

Meningkatkan keselarasan dengan kehidupan yang harmonis dalam lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera.



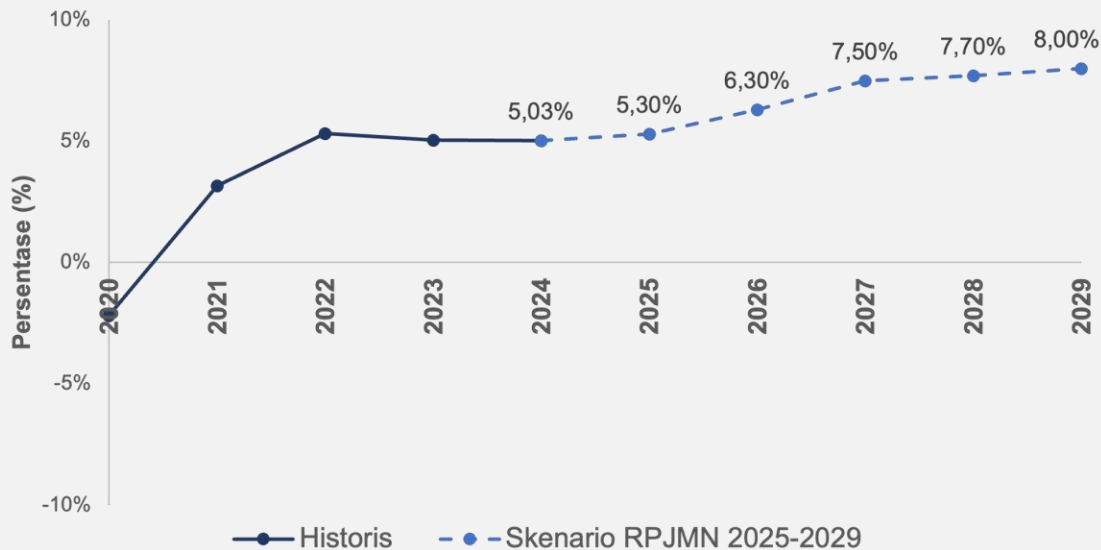
Prioritas pada Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

- Pembangunan Berketahanan Iklim


Transformasi Ekonomi melalui **Ekonomi Hijau**

Penerapan Ekonomi Hijau dapat mendukung **pertumbuhan ekonomi 8%** sekaligus membawa Indonesia mencapai **Net Zero Emissions pada tahun 2060** atau lebih cepat.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020-2029 (y-o-y)



Upaya pertumbuhan 8% dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi pada 2027 & 2028.

 Investasi	 Ekspor
+17% (USD 63 miliar) per tahun (BPKM, 2025)	+9% per tahun (Kemenko Ekon, 2023)

Sembilan Sektor Prioritas Investasi (BKPM, 2025):

1. Energi Baru & Terbarukan (EBT)
2. Industri Hilir
3. Ketahanan Pangan
4. Semikonduktor
5. Ekonomi Digital & Pusat Data
6. Industri Manufaktur Berorientasi Ekspor
7. Kesehatan
8. Ibu Kota Nusantara
9. Pendidikan dan Vokasi

Strategi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi hijau:



Transisi Energi

Optimalisasi sumber EBT (0,08% termanfaatkan) guna kemandirian energi.



Ekonomi Karbon

Potensi hingga USD 17 miliar melalui kredit karbon.



Hilirisasi Industri

Mampu menarik investasi hingga USD 46,4 miliar dan membentuk 180.000 lapangan kerja baru.

Peluang pengembangan **Ekonomi Hijau** dapat dicapai melalui dua strategi utama

1. **Transisi aktivitas ekonomi** eksisting agar dapat menerapkan praktik hijau dan berkelanjutan salah satu upayanya melalui **dekarbonisasi industri**



Penggunaan energi **terbarukan** dan penerapan **efisiensi energi**



Efisiensi sumber daya (penggunaan bahan baku dan air, minimalisasi bahan berbahaya beracun)



Pemanfaatan kembali limbah dalam proses produksi

Manfaat

- Meningkatkan produktivitas dengan efisiensi sumber daya, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan daya saing.
- Lebih tangguh terhadap risiko baik dari dampak fisik krisis iklim maupun instrumen kebijakan iklim yang terus berkembang seperti halnya pajak karbon.

2. **Menumbuhkan** pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor prioritas

- Banyaknya *startup* dan UMKM bermunculan memiliki *core business* yang menerapkan prinsip 9R ekonomi sirkular yaitu **Refuse – Rethink – Reduce – Reuse – Repair – Refurbish – Remanufacture – Recycle – Recover**.
- Pengembangan industri berbasis sumber daya alam atau bioekonomi, termasuk ekonomi biru.



Nilai ekonomi pemanfaatan dari tumbuhan dan satwa liar
Rp10.88 Triliun



Nilai produksi cari komoditas TCT (Tuna, Cakalang, Tongkol)
Rp39 Triliun



Potensi Ekonomi Sumber Daya Genetik
USD 19.4 miliar

Implementasi Ekonomi Hijau didukung dengan:



Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim



Percepatan Transisi Energi



Ekonomi Sirkular



Pengelolaan Hutan Lestari



Tenaga Kerja Hijau



Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan



Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Reformasi *Rule of Law* untuk Memperkuat Agenda Ekonomi Hijau

Untuk memastikan supremasi hukum (*rule of law*) Indonesia tidak hanya untuk mempercepat kegiatan ekonomi, tetapi sekaligus memperkuat perlindungan lingkungan, perlu dijalankan reformasi yang menyatukan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan.



Penguatan standar dan penegakan hukum lingkungan

Penajaman pengawasan dan penindakan pada sektor berisiko tinggi, dengan memastikan standar keberlanjutan diterapkan dan dipatuhi.



KLHS & RPPLH



Harmonisasi regulasi lintas sektor

Penyelarasan kebijakan lingkungan, investasi, dan industri, serta menjadikan standar lingkungan sebagai acuan lintas sektor.



Penguatan tata kelola spasial

Pemanfaatan ruang yang mengikuti daya dukung & daya tampung melalui penegakan perencanaan spasial, terutama untuk kawasan lindung; sempadan sungai, gambut, mangrove; kawasan rawan bencana; dan wilayah bernilai ekologis tinggi.



Integrasi sistem MRV lintas sektor dan penguatan tata kelola data

Membangun pemantauan dampak lingkungan yang terpadu serta transparan untuk memperkuat akuntabilitas & kepatuhan.





Kementerian PPN/
Bappenas

Terima Kasih

Direktorat Lingkungan Hidup
Kementerian PPN/Bappenas

